

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Permasalahan

Partisipasi merupakan aspek yang penting dari demokrasi, partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan sekelompok orang yang akan turut serta secara aktif baik dalam kehidupan politik dengan jalan untuk memilih pimpinan secara langsung atau tidak langsung, dan juga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan.¹ Partisipasi dari masyarakat tersebut dengan melalui mereka yang ikut serta dalam mengubah keputusan yang diatas oleh penguasa yang akan digantikan dengan mempertahankan kekuasaannya. Dalam hal ini perorangan baik pun kelompok akan selalu berusaha untuk mempengaruhi pemerintah baik yang akan ditentukan oleh alternatif yang akan digunakan untuk mencapai tujuan mereka sendiri.

Bentuk partisipasi masyarakat yang lebih jelas terlihat dalam pemilihan umum, dalam kegiatan ini masyarakat berperan serta dalam menentukan wakil yang akan duduk di pemerintahan. Pemberian suara dapat dianggap sebagai suatu bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, karena akan menurut keterlibatan minimal yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana.

Dalam mempertimbangkan partisipasi politik karena terbatasnya peristiwa tersebut harus ada perhatian terdapat mereka yang tidak ikut berpartisipasi sama sekali dalam proses politik. Ada 2 hal yang hendak dituju sesuai dengan hal tersebut yaitu:

1. Kebijakan yang menghendaki berlakunya kedaulatan rakyat melalui pemerintahan yang sesungguhnya dapat dibatasi oleh konstitusi dan dalam tanggung jawab waktu tertentu.

¹ A. Rahman H.I, Sistem Politik Indonesia : Graha Ilmu, 2007. Hal 285

2. Kebijakan yang menghendaki keabsahan pemerintahan baik dalam pengertian pertanggung jawaban politik serta mekanisme yang kuat dan efektif dengan tenggang waktu tertentu.²

Dalam mewujudkan partisipasi politik, masyarakat memiliki dua ciri atau bentuk dari partisipasi politik berdasarkan sifat yaitu yang dimobilisasi dan otonom. Dimobilisasi adalah banyak diantara orang-orang yang memberikan suara, berdemonstrasi atau mengambil tindakan lain yang kelihatannya sebagai partisipasi politik tidaklah bertindak dengan niat pribadi untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintahan bahkan mereka menggunakan hak pilihnya, karena disuruh dan dipaksa berbuat demikian padahal mereka tidak mengerti makna tindakan mereka. Sedangkan partisipasi politik otonom mengikuti dengan seksama, menganalisa baik buruknya dan pilihan atau kebijaksanaan yang diambil.³

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu.

Pemilihan umum merupakan sarana tidak terpisahkan dari kehidupan politik negara demokratis modern. Pemilihan umum dilakukan sebagai tata cara untuk memperoleh kedudukan atau status sebagai wakil rakyat atau sebagai anggota badan perwakilan dengan memanfaatkan pemilihan umum sebagai usaha pembentukan dan pertumbuhan sistem

² Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 26.

³ A. Rahman, *Op Cit.* hal. 288

perwakilan politik rakyat.⁴ Oleh sebab itu pemahaman kita tentang pemilihan umum terutama dalam konteks demokrasi yakni pemilihan umum dapat dipandang sebagai suatu prosedur untuk mengumpulkan data-data tertentu.

Makna pemilihan umum yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokrasi adalah sebagai institusi dalam memperebutkan kekuasaan atau pengaruh yang dilakukan dengan norma dan etika sehingga sirkulasi politik atau pergantian kekuasaan dapat dilakukan secara damai dan beradab. Lembaga tersebut adalah produk dari pengalaman sejarah umat manusia dalam mengelola kekuasaan dimana kedaulatan rakyat menjadi sumber kekuasaan itu sendiri.⁵

Partisipasi politik tidak hanya dibina melalui partai politik, tetapi juga melalui organisasi-organisasi yang mencakup golongan pemuda, golongan buruh, serta organisasi-organisasi kebudayaan dengan melalui pembinaan yang ketat potensi masyarakat dapat dimanfaatkan secara terkendali. Ada beberapa faktor utama yang membentuk partisipasi di Indonesia salah satunya adalah faktor etnisitas. Kelompok etnis mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi seseorang. Dengan adanya rasa kesukuan atau kedaerahan sehingga dapat mempengaruhi dukungan seseorang terhadap partai politik. Etnis juga dapat mempengaruhi loyalitas terhadap partai tertentu.

Di Indonesia secara relatif terdapat kesetiaan etnis yang relatif tinggi dan bahwa partai politik Indonesia dipengaruhi oleh etnisitas.⁶ Kesetiaan etnis di Indonesia masih terlihat sangat signifikan dan mengabaikan faktor etnis yang dapat menimbulkan kesalah pahaman tentang politik di Indonesia. Maka dapat dikatakan hal diatas menunjukkan adanya pengaruh etnisitas terhadap perilaku politik seseorang.

⁴ Lance, Castles, *Pemilu 2004, Yogyakarta*; Pustaka Pelajar 2004. Hal. 11

⁵ Koiruddin, *Profil Pemilu 2004, Yogyakarta*; Pustaka Pelajar 2004. Hal. 11

⁶ Leo Suryadinata, *Penduduk Indonesia, Etnis dan Agama Dalam Era Perubahan Politik*, Jakarta; LP3S, 2003, hal. 182

Masyarakat etnis keturunan Arab atau Suku Arab di Indonesia merupakan salah satu etnis yang minoritas yang berada di Indonesia, keberadaan mereka berasal dari pedagang-pedagang Arab yang mendatangi Indonesia yang bertujuan untuk menyiarkan agama Islam dan berdagang. Masyarakat ini juga merupakan warga negara Indonesia, yang hanya saja apabila dilihat dari segi fisik mereka mungkin memiliki perbedaan dengan suku di Indonesia kebanyakan.

Suku ini tersebar di seluruh Indonesia, misalnya di Jakarta (Pekojan), Surakarta (Pasar Kliwon), Surabaya (Ampel), Malang (Jagalan), Cirebon (Kauman), Mojokerto (Kauman), Yogyakarta (Kauman) dan Probolinggo (Diponegoro) -- serta masih banyak lagi yang tersebar di kota-kota seperti Palembang, Banda Aceh, Sigli, Medan, Banjarmasin, Makasar, **Gorontalo**, Ambon, Mataram, Kupang, Papua dan bahkan di Timor Timur. Pada jaman penjajahan Belanda, mereka dianggap sebagai bangsa Timur Asing bersama dengan suku Tionghoa-Indonesia dan suku India-Indonesia, tapi seperti kaum etnis Tionghoa dan India, tidaklah sedikit yang berjuang membantu kemerdekaan Indonesia⁷. Salah satu keberadaan masyarakat ini adalah di kota Gorontalo. Masyarakat ini berada di beberapa perkampungan yang tersebar di wilayah kota Gorontalo.

Suku Arab merupakan etnis yang juga selayaknya diperhitungkan dalam kancan perpolitikan baik nasional maupun daerah. Dasar ketertarikan penulis dalam studi penelitian ini, yakni penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai kehidupan dan bentuk partisipasi politik masyarakat etnis keturunan Arab secara khusus pada pemilihan kepala daerah langsung Gubernur Gorontalo tahun 2011. Karena mulai bulan Juni 2005, Peristiwa ini menandai babak baru dalam sejarah politik daerah Indonesia; pemilihan secara langsung oleh

⁷ Arab Indonesia, <http://id.wikipedia.org/wiki/Arab-Indonesia>, (diakses tgl 06.05.2012).

rakyat 33 gubernur, 349 Bupati, dan 91 Walikota di berbagai provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia⁸.

Partisipasi politik etnis Arab di provinsi Gorontalo dan Kota Gorontalo pada khususnya sangat diperhitungkan. Hal ini terbukti dengan beberapa tokoh Arab yang bisa menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan baik sebagai pejabat struktural maupun jabatan politik seperti Fadel Muhamad dan beberapa tokoh lainnya yang duduk di lembaga legislatif baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Dari segi identifikasi partai politik etnis Arab sebagian besar terfragmentase pada tiga partai yakni, Partai Golkar, PPP dan PKS.

Keterlibatan etnis Arab di Kota Gorontalo dalam perhelatan Pemilihan Gubernur Gorontalo Periode 2011-2016 cukup signifikan tingkat partisipasinya. Sesuai dengan observasi awal yang dilakukan oleh penulis tergambar bahwa pasangan Rusli Habibi dan Idris Rahim yang diusung oleh Partai Golkar dan PPP mendapat dukungan besar dari kalangan Jamaa di Provinsi Gorontalo, oleh sebab itu hampir keseluruhan etnis Arab khususnya di Kota Gorontalo mendukung kandidat tersebut. Akan tetapi yang menjadi pernyataan penting dalam membaca fenomena ini adalah; apakah keterlibatan dan partisipasi itu diakibatkan dari proses identifikasi partai atautah karena ketokohan dari elit politik Arab (Fadel Muhamad) yang membuat etnis Arab di Kota Gorontalo berpartisipasi dan memberikan dukungan begitu besar kepada pasangan calon yang di usung dari partai Golkar dan PPP.

Jika identifikasi partai⁹ yang memotori keterlibatan mereka dalam pemilihan tersebut maka, pertimbangan aktor atau ikatan paternalistik¹⁰ tidak berpengaruh pada proses partisipasi dukungan politik. Secara sosio-kultural masyarakat kita masih terpolarisasi dengan budaya patrimonial, dimana ketokohan aktor yang mendominasi partisipasi politik, dimana

⁸ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan kepala Daerah Langsung, (Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 1.

⁹ Masyarakat memilih kandidat tertentu dikarenakan kedekatan psikologis antara pemilih dengan partai politik, atau dengan kata lain pilihan masyarakat berdasarkan pada partai politik.

¹⁰ Partisipasi politik masyarakat didorong oleh keberadaan aktor ketokohan dalam komunitas masyarakat.

ukuran partisipasi politik masyarakat khususnya dalam pemberian suara digerakan oleh tokoh-tokoh yang ada dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Olehnya itu, tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan etnis Arab Kota Gorontalo dalam pemilihan Gubernur Gorontalo tidak terlepas dari pengaruh ketokohan Fadel Muhammad. Pada level partisipasi politik, ketika partisipasi politik etnis Arab diperhadapkan pada narasi tersebut maka, bisa dikatakan partisipasi politik etnis Arab lebih bermuara pada partisipasi semu karena digerakan oleh orang lain diluar individu yang bersangkutan ketimbang partisipasi aktif¹¹ atau dalam keadaan sadar dan tidak digerakan oleh pihak lain.

Atas hal tersebut, maka tulisan ini bertujuan untuk memetakan partisipasi politik etnis Arab yang dilihat dari dua perspektif, yakni partisipasi yang didorong oleh kedekatan psikologis partai dan partisipasi politik diakibatkan dari dorongan pendekatan aktor atau ketokohan. Sehingga pendefinisian partisipasi politik dalam tulisan ini lebih fokus pada partisipasi politik etnis Arab dalam memberikan dukungan politik pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur Gorontalo. Berangkat dari latar belakang pemikiran di atas maka, formulasikan judul dalam penelitian adalah **“Partisipasi Politik Etnis Arab Pada Pemilihan Gubernur Gorontalo Periode 2011-2016 Di Kota Gorontalo.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latarbelakang permasalahan di atas maka, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana partisipasi politik etnis Arab di Kota Gorontalo pada pemilihan Gubernur Gorontalo periode 2011-2016 ?
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi politik etnis Arab di Kota Gorontalo pada pemilihan Gubernur Gorontalo periode 2011-2016 ?

¹¹ Bacaan yang bisa membantu pemahaman mengenai partisipasi semu dan aktif bisa ditemukan dalam bukunya Almond Verba, Budaya Politik (1990)

1.3. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan permasalahan di atas maka, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik etnis Arab di Kota Gorontalo pada pemilihan Gubernur Gorontalo periode 2011-2016
- b. Dapat mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi politik etnis Arab di Kota Gorontalo pada pemilihan Gubernur Gorontalo periode 2011-2016

1.4. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah :

- a. Untuk penulis sendiri agar dapat meningkatkan kemampuan dalam membuat karya tulis ilmiah.
- b. Untuk penelitian juga dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang ada terutama bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Prodi. PKn dan juga bagi mahasiswa lainnya yang tertarik dengan bidang politik.
- c. Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi para akademisi khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang Partisipasi politik etnis Arab pada pemilihan Gubernur Gorontalo periode 2011-2016.